

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat itu tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan cara yang berbeda-beda¹.

Dengan istilah ekspor-impor dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terkandung asas Keadilan Terjadinya perdagangan dapat memberi pengaruh positif dan pengaruh negatif, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan

¹Roselyne Hutabarat, 1997, *Transaksi Ekspor-Import*, Jakarta: Erlangga, Hal.1

menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dalam bidang impor, yang diperlukan untuk menunjang barang-barang ekspor tadi, umumnya yang diimpor adalah bahan baku industri, mesin-mesin, bahan-bahan kimia, ditambah dengan barang-barang modal untuk pelaksanaan pembangunan. Selain itu impor juga menyangkut bahan / barang kebutuhan konsumsi yang belum dapat di produksi dalam negeri.²

Pengaruh keseluruhan dari perdagangan ekspor-impor ini tanpa memandang penyebab-penyebabnya adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara yang mengimpor dan mengekspor barang-barang tersebut. Transaksi ekspor- impor secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat didalamnya.

Terjadinya perdagangan dapat memberi pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap suatu negara, pengaruh positif dari suatu perdagangan internasional adalah dapat meningkatkan kemakmuran warga negaranya dan menjadi stimulan pertumbuhan industri dalam negeri, sedangkan pengaruh negatif dari suatu perdagangan internasional adalah menghambat pertumbuhan industri dalam negeri dalam mendapatkan devisa

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat

² *Ibid.*

Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan di Indonesia.

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan³.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanan, yaitu pertama kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional⁴.

.Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya untuk mengadakan perubahan Terhadap Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Perubahan ini meliputi unsur-unsur :

1. Keadilan.

³ Ali Purwito, 2007, Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan), Yogyakarta, Graha Ilmu.

⁴ *Ibid.*

2. Transparansi.
3. Akuntabilitas.
4. Pelayanan publik dan pembinaan pegawai yang diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.⁵

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum fleksibel yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung asas Keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud tersebut, aparatur Kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Undang-undang Kepabeanan telah memperhatikan aspek-aspek :

⁵ *Ibid.*

- a. Keadilan, sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan Kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- b. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas tempat penimbunan berikat, serta pembebasan bea masuk atau impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan;
- c. Netralisasi dalam pemungutan, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;
- d. Kelayakan administrasi, merupakan pelaksanaan administrasi Kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali sederhana dan mudah dipakai oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat diberikan serendah mungkin;
- e. Kepentingan penerimaan Negara, dalam arti ketentuan dalam undang-undang ini memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari suatu penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan dan dapat mengantisipasi semua kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
- f. Penetapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan diatur dalam undang-undang ini ditaati;
- g. Wawasan Nusantara, sehingga ketentuan undang-undang ini diberlakukan di daerah Pabean meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, perairan nusantara, laut wilayah, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.⁶

Undang-undang Kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan yang digantikannya, antara lain ketentuan tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembebanan semua administrasi, penyidikan dan lembaga banding.

⁶ Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Selain itu untuk menempatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang dan dokumen agar menjadi semakin baik, efektif, dan efisien, maka diatur pula antara lain :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan secara selektif
- b. Penyerahan pemberitahuan Pabean melalui media elektronik (hubungan antara komputer)
- c. Pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititik beratkan pada audit di bidang Kepabeanan terhadap pembukuan perusahaan.
- d. Peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas bea masuk dengan menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terutang (*self assessment*), dengan tetap memperhatikan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang seperti pornografi, narkoba, uang palsu dan senjata api.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti mengambil judul:

**“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGURUSAN DOKUMEN
IMPOR PADA KANTOR BEA DAN CUKAI SURAKARTA”**

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah disini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas agar permasalahan menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah ditentukan.

Kemudian perlu diketahui pula bahwa mengenai pokok permasalahan di dalam penulisan ini, peneliti akan membatasi pada pelaksanaan pengurusan

dokumen impor pada kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam pelaksanaan impor beras dan gula.

C. Perumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini hendak merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pengurusan dokumen impor pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Surakarta?
2. Apakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam pengurusan dokumen impor pada kantor Bea dan Cukai Surakarta? Serta bagaimana penyelesaian hambatan maupun kendala tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan yaitu **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGURUSAN DOKUMEN IMPOR PADA KANTOR BEA DAN CUKAI SURAKARTA”**. Dengan perumusan masalah yang peneliti kemukakan tersebut diatas, maka untuk mencari jawaban permasalahan di atas, maka peneliti mengadakan penelitian untuk mencari data-data yang akan dianalisis guna menjawab permasalahan tersebut yang bertujuan :

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pengurusan dokumen impor di kantor Bea dan Cukai Surakarta.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering ditemui dalam proses pengurusan dokumen impor pada kantor Bea dan Cukai Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

- Untuk memperoleh pengetahuan khususnya dalam Prosedur dan Pelaksanaan pengurusan dokumen impor di kantor Bea dan Cukai Surakarta.
- Memperoleh data mengenai prosedur dan pelaksanaan pengurusan dokumen impor di kantor Bea dan Cukai Surakarta.
- Mengetahui hambatan-hambatan yang sering di temui dalam pengurusan dokumen impor serta upaya penyelesaiannya di Kantor Bea dan Cukai Surakarta.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis, serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum UMS.

F. Metodologi Penelitian.

Metodologi penelitian adalah merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang suatu gejala untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan bersangkutan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian merupakan suatu yang harus ada dalam penelitian.

Agar suatu penelitian mempunyai nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi, maka diperlukan metodologi yang benar, peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, memberikan data seteliti mungkin tentang Pelaksanaan pengurusan dokumen impor pada kantor Bea dan Cukai Surakarta.

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian sesuai dengan judul diatas peneliti mengambil lokasi di wilayah Surakarta, denan sasaran pada kantor Bea dan Cukai Surakarta.

3. Metode Pendekatan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis adalah melihat atau memandang sesuatu hal yang ada dari aspek atau segi hukum, sedangkan sosiologis adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat

hukum. Sehingga maksud dari pendekatan ini adalah suatu pendekatan dengan cara pandang kacamata hukum mengenai pelaksanaan penurusan dokumen impor pada kantor Bea dan Cukai Surakarta yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan perundang-undangan yang ada.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer.

Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yaitu dari Kantor Bea dan Cukai Surakarta.

2. Data Sekunder.

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun dari buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer.

Yang diperoleh di lokasi dalam hal ini akan diperoleh secara langsung yaitu dari pihak-pihak yang terkait langsung dalam masalah ini, yaitu Kepala kantor Bea dan Cukai Surakarta.

2. Sumber Data Sekunder.

Merupakan sumber data secara tidak langsung yang dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer

yang berasal dari beberapa literatur catatan, dokumen, serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data.

Data adalah suatu hasil dari gejala yang akan diteliti dan digunakan kebenarannya, dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Study Lapangan.

1. Interview atau Wawancara.

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan lisan kepada staf perbendaharaan dan kepala kantor bea dan cukai Surakarta.

2. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data yang mengadakan pengamatan secara langsung pada kantor bea dan cukai Surakarta serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala obyek yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan.

Merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip dari buku; literatur; arsip; peraturan perundangan maupun dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan nasalah yang akan diteliti.⁷

6. Analisa Data.

⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 211.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah :

“Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.⁸

Dalam metode ini yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu langkah pertama mengumpulkan data, setelah data terkumpul data direduksi artinya diseleksi kemudian diadakan penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan Skripsi.

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas, maka di bawah ini akan peneliti kemukakan sistematika yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Pembatasan Masalah.
- C. Perumusan Masalah.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996 hal. 250.

- D. Tujuan Penelitian.
- E. Manfaat Penelitian.
- F. Metodologi Penelitian.
- G. Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian umum mengenai impor dan dasar hukum impor.
- B. Tugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai menurut undang-undang kepabeanan
- C. Tugas dan wewenang perusahaan jasa dalam pengurusan dokumen impor.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian Rumusan Masalah.
 - 1. Deskripsi lokasi penelitian.
 - 2. Prosedur dan pelaksanaan pengurusan dokumen impor pada Kantor Bea dan Cukai Surakarta.
 - 3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengurusan dokumen impor pada Kantor Bea dan Cukai Surakarta serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.